

## ABSTRAK

Maraknya tindak pidana yang berkaitan dengan investasi ilegal, telah banyak menimbulkan korban yang jumlah dan kerugiannya sangat besar. Salah satunya adalah praktik investasi ilegal yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Pandawa. Pidanaan terhadap pelaku ternyata tidak memulihkan kerugian yang diderita oleh korban, oleh karena itu dilakukan penelitian skripsi terkait “Pengembalian Kerugian Korban Yang Disebabkan Oleh Investasi Ilegal oleh Koperasi”. Metode penelitian yang digunakan meliputi tipe penelitian yaitu penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi ilegal merupakan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilarang yang terdapat dalam KUHP, Undang Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta penanggungjawabannya dalam hal koperasi sebagai pelaku investasi ilegal maka pengurusnya yang harus bertanggungjawab.

Mekanisme pengembalian dana melalui peradilan pidana di Indonesia terdapat kekosongan hukum yang menyebabkan terjadinya kerugian korban tidak kembali seutuhnya atau tidak kembali sama sekali. Berdasarkan penelitian ini dan pemerintah sebagai pelindung dan penjamin hak warga negaranya perlu mengatur cara pengembalian kerugian korban demi kepastian hukum dalam suatu negara. Terkait mekanisme pemulihan kerugian korban oleh karena tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur maka pengaturannya menggunakan: ketentuan Pasal 98 KUHP Pasal 14c ayat (1) KUHP Tentang Pedoman Pemulihan Aset melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA), Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**Kata kunci :** *Investasi ilegal, pengembalian dana, tindak pidana*

## ***ABSTRACT***

The rise of criminal acts related to illegal investment, has caused many victims whose numbers and losses are very large. One of them is an illegal investment practice carried out by the Pandawa Cooperative Management. Penalties against the perpetrators apparently did not recover the losses suffered by the victims, therefore a thesis research was carried out related to "Returning Victim Losses Caused by Illegal Investment by the Cooperative". The research method used includes the type of research that is normative research with a statutory approach, conceptual approach and case studies. The results of the study indicate that illegal investment is a criminal act that fulfills the elements of prohibited acts contained in the Criminal Code, Banking Law, Law Number 7 of 2014 concerning Trade, Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication Money Laundering and its responsibility in the case of cooperatives as illegal investment actors, the management must take responsibility.

The mechanism for refunding money through criminal justice in Indonesia had a loophole that causes the loss of victims not to return completely or not at all. Related to the mechanism of victim loss recovery due to the absence of provisions that specifically regulate, the regulation uses: the provisions of Article 98 KUHAP Article 14c paragraph (1) of the Criminal Code Regarding Guidelines for Recovery of Assets through the Asset Recovery Center (PPA), Government Regulation Number 7 of 2018 concerning Granting Compensation Restitution and Assistance to Victim Witnesses; Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes.

***Keywords:*** *illegal investment, investor refund, criminal act*